

Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah

Kinerja Strategis Sub Sektor	SASARAN STRATEGIS I						SASARAN STRATEGIS II						SASARAN STRATEGIS III						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						Meningkatnya Investasi Daerah						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah						
	Indikator Kinerja (IKU)						Indikator Kinerja (IKU)						Indikator Kinerja (IKU)						
Kinerja Taktil	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat						Nilai Realisasi Investasi						Nilai AKIP						
	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pemantauan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan			Menurunnya Jumlah Pengaduan Masyarakat			Meningkatnya Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal			Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi			Meningkatnya Layanan Administrasi Perangkat Daerah	
	I.K. Jumlah Naskah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	I.K. Jumlah Laporan Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan Per Periode			I.K. Jumlah Laporan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan			I.K. Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	I.K. Jumlah Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah			I.K. Jumlah Laporan perkembangan kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha			I.K. Jumlah Ketersediaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal			I.K. Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	I.K. Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang di delegasikan																		
	I.K. Presentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi Standar Minimum																		
	I.K. Presentase SDM yang memiliki Kompetensi																		
Kinerja Operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan	Tersedianya SDM Pelayanan yang sesuai Kompetensi	Tersedianya Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Prima	Terselenggaranya Inovasi Layanan	Terselenggaranya Bimtek Pemahaman Perizinan dan Non Perizinan	Terselenggaranya Pemantauan MPP	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Terselenggaranya Koordinasi antar Tim Teknis	Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Promosi Penanaman Modal secara Online	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	Terselenggaranya Bimtek Kepada Pelaku Usaha	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Secara Elektronik	Terpeliharanya Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Peraktoran
	I.K. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan	I.K. Jumlah SDM yang sesuai Kompetensi	I.K. Lamanya waktu layanan perizinan dan non perizinan	I.K. Jumlah Pelayanan Keliling yang dilaksanakan	I.K. Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	I.K. Jumlah Kegiatan Pemantauan Terhadap MPP	I.K. Jumlah Konsultasi dan Pengaduan yang dilayani	I.K. Jumlah Forum PTSP yang dilaksanakan	I.K. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	I.K. Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Investasi	I.K. Jumlah Promosi Penanaman Modal secara Online yang tersedia	I.K. Jumlah Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha yang diselesaikan	I.K. Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	I.K. Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	I.K. Jumlah Sistem Informasi Elektronik yang tersedia	I.K. Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal yang terpelihara	I.K. Jumlah Dokumen Perencanaan da n Pelaporan Kinerja	I.K. Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Kantor yang Tersedia	I.K. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Perkantoran
			I.K. Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses	I.K. Jumlah Layanan Digital yang tersedia di MPP	I.K. Jumlah Kecamatan yang diberikan pemahaman														
CROSSCUTTING	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persetujuan bangunan gedunga dan kesesuaian tata ruang																	
	Dinas Lingkungan Hidup	Persetujuan lingkungan																	
	Dinas Kesehatan	Izin operasional fasilitas kesehatan dan rekomendasi kesehatan																	
	Diskoperindag	Rekomendasi usaha perdagangan dan industri																	
	Disparbudpora	Rekomendasi pariwisata																	
	Diskominfo	Penguatan sistem digital pelayanan																	
	Bapperida	Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah																	
	Inspektorat	Pengawasan kualitas pelayanan																	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar serta kepastian tata ruang																	
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan kawasan pemukiman dan kawasan strategis																	
Dinas Perhubungan	Dukungan aksesibilitas dan kelancaran distribusi																		
Diskoperindag	Pengembangan sektor industri dan perdagangan																		
Disparbudpora	Pengembangan destinasi unggulan untuk investasi pariwisata																		
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dukungan investor sektor pertanian																		
Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dukungan investor sektor perkebunan dan peternakan																		
Dinas Perikanan	Dukungan investor sektor perikanan																		
Bapperida	Sinkronisasi dengan RPJMD																		
Dinas Lingkungan Hidup	Persetujuan lingkungan																		

Kuala Tungkal, 8 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

M. HANIZ, S.E., M.M.
Pembinu Tk. I
NIP. 19740613 199602 1 001